

## Strategi DPMPTSP dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pendampingan Pengurusan SPP-IRT di Kota Surabaya

Agung<sup>1</sup>, Andhika Akbar Ramadhan<sup>2</sup>, Fajar Tridian Syaputra<sup>3</sup>, Calvin Edo Wahyudi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010108@student.upnjatim.ad.id<sup>1</sup>, 21041010223@student.upnjatim.ac.id<sup>2</sup>,

21041010213@student.upnjatim.ac.id<sup>3</sup>, kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) through assistance in obtaining Home Industry Food Production Certificates (SPP-PIRT). MSMEs, as a crucial pillar of the local economy, require business legality to expand market access and enhance competitiveness, especially in facing global economic challenges. One form of legality required is SPP-PIRT, which ensures the quality and safety of food products. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings reveal that DPMPTSP Surabaya has implemented various strategies to raise MSME awareness about the importance of business legality through socialization, training, and technical assistance. The results indicate a significant increase in the number of SPP-PIRT certificates issued, particularly in 2022 and 2023. However, a sharp decline in 2024 highlights challenges in sustaining the assistance program. Through SWOT analysis, the study identifies DPMPTSP's strengths, such as government support and technological infrastructure, while also uncovering weaknesses related to MSMEs' dependency on assistance. It is recommended that DPMPTSP enhance sustainable training programs, strengthen collaboration with stakeholders, and adopt more adaptive and continuous assistance approaches to boost MSME competitiveness in Surabaya.*

**Keywords:** business legality; DPMPTSP; SWOT analysis

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui pendampingan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). UMKM yang menjadi pilar penting perekonomian daerah, memerlukan legalitas usaha untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi secara global. Salah satu bentuk legalitas yang diperlukan adalah SPP-PIRT, untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mendapat hasil bahwa DPMPTSP Kota Surabaya telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, melalui sosialisasi, pelatihan, dan

pendampingan teknis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah sertifikat SPP-PIRT yang diterbitkan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan jumlah sertifikat yang signifikan, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan program pendampingan. Melalui analisis SWOT, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan DPMPTSP dalam hal dukungan pemerintah daerah dan infrastruktur teknologi, tetapi juga mengungkapkan kelemahan terkait ketergantungan pelaku UMKM pada pendampingan. Oleh karena itu, disarankan agar DPMPTSP meningkatkan program pelatihan berkelanjutan, memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder, serta memperbaiki pendekatan pendampingan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM di Surabaya.

**Keywords:** legalitas usaha; DPMPTSP; analisis SWOT

## PENDAHULUAN

Ketahanan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang mandiri, stabil, dan berkelanjutan. Di Indonesia, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM telah terbukti menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti krisis global, dengan menyediakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di tingkat lokal. Oleh karena itu UMKM dapat menjadi pilar utama dalam sebuah roda ekonomi yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Namun, keberlanjutan dan daya saing UMKM menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait tentang pentingnya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Legalitas ini tidak hanya penting untuk memenuhi aspek hukum, tetapi juga membuka akses terhadap fasilitas pendukung usaha, seperti permodalan, pasar yang lebih luas, dan peluang ekspansi ke tingkat nasional maupun internasional yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku usaha atau UMKM. Kurangnya legalitas sering kali membuat UMKM sulit bersaing, terutama di era globalisasi dan digitalisasi karena kepercayaan masyarakat yang rendah akan tidak ada atau kurangnya legalitas.

Untuk mendapat kepercayaan publik, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya memiliki peran strategis dan kritis dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program pendampingan pengurusan SPP-PIRT. SPP-PIRT sendiri merupakan salah satu sertifikasi penting bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan, karena untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dengan adanya sertifikasi tersebut, produk yang dihasilkan dapat dijamin akan kualitas dan legalitasnya.

Namun, sampai saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur pengajuan SPP-PIRT karena menganggap bahwa prosesnya rumit dan memakan waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP meluncurkan berbagai program inovatif, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis guna meningkatkan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha.

Dalam implementasinya, program-program ini menghadapi tantangan yang terjadi di lapangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran terhadap perubahan, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas peran yang dilakukan oleh DPMPTSP dalam membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami strategi yang digunakan untuk dapat memperkuat program pendampingan dan meningkatkan daya saing UMKM di Kota Surabaya.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama terkait peran DPMPTSP dalam mendukung UMKM. Penelitian ini ingin menggambarkan sejauh mana peran DPMPTSP untuk berkontribusi dalam proses pengurusan SPP-PIRT dan kendala apa saja yang dihadapi pelaku UMKM selama proses tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas program pendampingan, menganalisis tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan program ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Menurut Cresswell dalam Rukin (2019) penelitian kualitatif akan menghasilkan pengetahuan melalui pemahaman berbagai sudut pandang yang diperoleh dari beragam masukan para partisipan yang terlibat, bukan hanya dari pandangan peneliti semata sehingga akan mendapatkan berbagai kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini beragam, seperti catatan hasil observasi, wawancara, dan sejarah Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan secara mendalam proses, tantangan, dan hasil dari program pendampingan. Lokasi penelitian adalah DPMPTSP Kota Surabaya, dengan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Oktober hingga Desember 2024.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memotret dan meninjau secara langsung situasi di lapangan, sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dengan program, seperti staf DPMPTSP dan pelaku UMKM. Studi dokumentasi

melibatkan pengumpulan data sekunder dari arsip, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan dan berhubungan. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu informasi langsung dari wawancara dan observasi, serta data sekunder yang mencakup literatur, bahan baca, dan regulasi terkait.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman dimana menurut Haryoko, (2020) analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman mengarahkan pada tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam program pendampingan DPMPTSP. Hasil analisis ini diharapkan memberikan wawasan strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan dan mendukung pengembangan UMKM di Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya menjalankan peran yang penting dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dimana terkait dengan pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) ini akan dilakukan secara aktif di tingkat kelurahan dan kecamatan melalui workshop, seminar, serta kunjungan lapangan. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki legalitas usaha, terutama SPP-PIRT, sebagai langkah awal dalam memastikan keamanan dan kualitas produk pangan.

Dalam implementasinya, materi yang disampaikan mencakup manfaat memiliki SPP-PIRT, prosedur pengajuan, hingga persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus. Petugas DPMPTSP akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi teknis secara langsung, seperti pentingnya pelatihan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana produksi. Keuntungan dari pelaksanaan sertifikasi ini, diharapkan adanya peningkatan kepercayaan konsumen, nilai jual produk yang lebih tinggi, dan akses ke pasar yang lebih luas, yang juga dijelaskan secara rinci oleh lembaga berwenang.

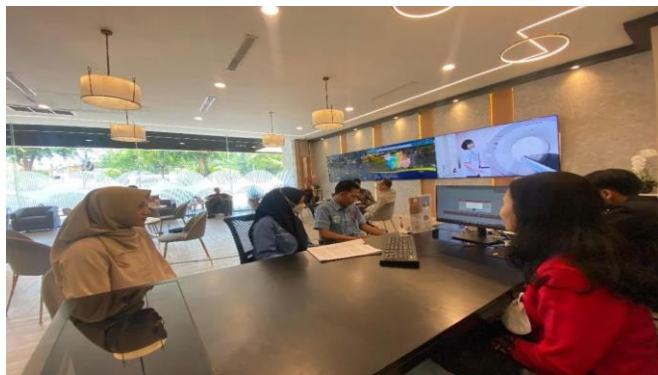
Sosialisasi dilakukan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat guna mengurangi hingga menghilangkan pandangan bahwa proses perizinan itu rumit, memakan waktu, dan menggunakan biaya yang mahal. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan lebih memahami dan termotivasi untuk segera mengurus legalitas

usahanya, khususnya SPP-PIRT. Strategi ini telah menunjukkan keberhasilan awal dalam meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya partisipasi di beberapa wilayah.



**Gambar 1.** Sosialisasi NIB dan SPP-PIRT di Kecamatan Rungkut  
Sumber: Dokumen Pribadi

Selain itu, untuk mempermudah dalam pengurusan DPMPTSP juga memanfaatkan teknologi melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan perizinan secara daring. Hal ini membuat proses lebih cepat, mudah, dan dapat diakses oleh siapa saja, bahkan dari lokasi yang jauh. Dalam upayanya meningkatkan efisiensi, DPMPTSP juga menyediakan pendekatan langsung seperti Klinik Investasi, yang menjadi inovasi penting dalam layanan perizinan.



**Gambar 2.** Klinik Investasi  
Sumber: Dokumen Pribadi

Klinik Investasi dibentuk untuk memberikan kenyamanan maksimal sehingga pengguna merasa puas dan nyaman dengan layanan yang tersedia. Proses yang transparan memungkinkan estimasi waktu penyelesaian dokumen menjadi jelas dan

lebih cepat, karena seluruh prosedur dilakukan secara sistematis berbasis teknologi dan terstruktur. Pemohon juga dapat memantau perkembangan pengajuan dokumen dari jarak jauh melalui website yang terintegrasi langsung dengan tim Klinik Investasi. Kemudahan akses dan fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP ini mencerminkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan, mendukung kemajuan ekonomi Kota Surabaya, mulai dari sosialisasi yang proaktif hingga layanan terpadu yang transparan. Seluruh upaya ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus legalitas usaha mereka.

### **Pendampingan Prosedur Pengajuan SPP-PIRT**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). Pendampingan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan, sehingga proses pengurusan sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tanpa kendala berarti.

Proses pendampingan dimulai dengan memberikan panduan dan pengetahuan kepada pelaku usaha tentang persyaratan utama yang harus dipenuhi, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelatihan keamanan pangan, dan pemeriksaan fasilitas produksi. Pelaku usaha juga diarahkan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, termasuk fotokopi sertifikat pelatihan, KTP, label produk, denah lokasi usaha, sampel produk, dan surat keterangan kesehatan dari puskesmas. Semua dokumen ini menjadi syarat utama sebelum pelaku UMKM dapat mengajukan sertifikat SPP-PIRT secara resmi.

Untuk memastikan kelancaran proses, DPMPTSP memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan pelaku UMKM mengajukan dokumen secara daring dengan mengakses internet. Setelah semua persyaratan terpenuhi, akan dilakukan uji kompetensi yang melibatkan pemeriksaan sarana produksi oleh tim Dinas Kesehatan. Jika pelaku usaha lulus uji kompetensi, mereka akan mendapatkan sertifikat pelatihan pangan yang menjadi dasar untuk menerbitkan SPP-PIRT. Pendampingan ini juga melibatkan penjelasan rinci tentang alur pengajuan SPP-PIRT, termasuk pendaftaran di OSS, pengisian data di situs BPOM, dan pemenuhan komitmen berkas yang harus dipenuhi. Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, DPMPTSP akan memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memahami dan mengikuti prosedur dengan lebih mudah dan cepat, hal ini merupakan upaya yang tidak hanya membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas tetapi juga meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pendekatan pendampingan yang

diberikan oleh DPMPTSP mencerminkan komitmen untuk memfasilitasi pelaku UMKM di Kota Surabaya, sehingga mereka dapat mengatasi hambatan administratif dan fokus pada pengembangan usaha secara berkelanjutan.

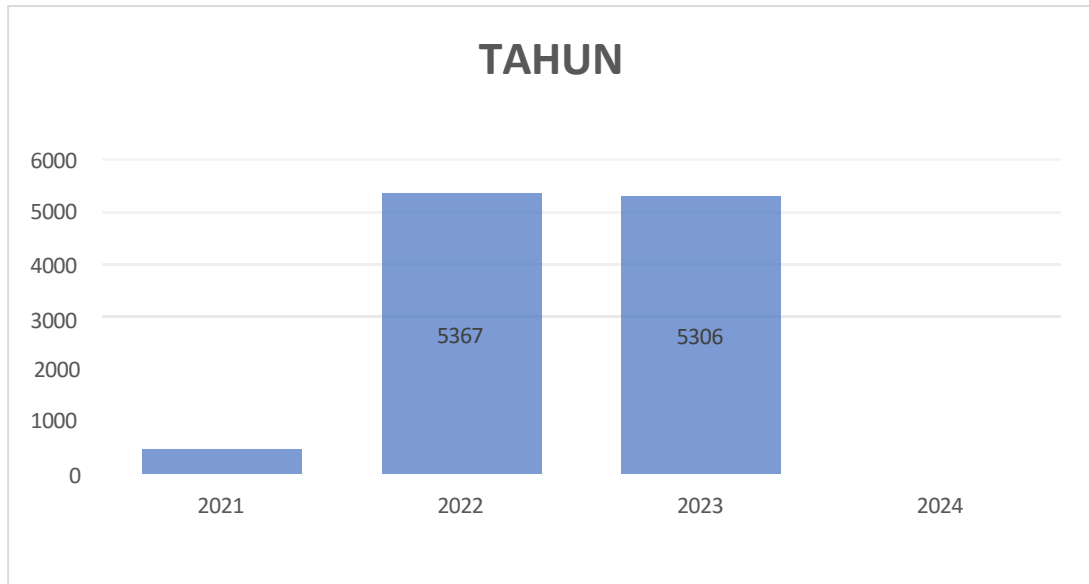
## **Peran DPMPTSP Kepada UMKM**

DPMPTSP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan terkait langsung atas pembinaan UMKM, memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM untuk membantu mereka memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan pendampingan yang mencakup berbagai layanan, seperti konsultasi, pelatihan, dan kunjungan langsung ke lokasi produksi. Melalui pendekatan ini, UMKM diharapkan lebih memahami standar yang harus dipenuhi, sehingga mereka lebih mudah memperoleh sertifikasi seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Selain meningkatkan kualitas produk, pendampingan ini juga memastikan bahwa produk UMKM mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan bertahan secara kontinu.

Untuk meningkatkan efektivitas program yang telah direncanakan, DPMPTSP menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perguruan tinggi atau universitas, dan lembaga lainnya yang dapat membantu keberlangsungan program. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memungkinkan UMKM mendapatkan akses ke pendampingan, pelatihan, dan sumber daya yang mendukung pengembangan usaha mereka. Dalam hal ini, BPOM memainkan peran penting dengan memberikan panduan teknis tentang pengemasan, pelabelan, dan pemenuhan standar pangan, serta memverifikasi dokumen dan menilai produk yang diajukan oleh UMKM. Sedangkan kemitraan dengan perguruan tinggi juga berkontribusi melalui pelatihan berbasis riset dan inovasi yang membantu UMKM meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui riset dan evaluasi yang ada. Pelatihan ini mencakup penerapan teknologi modern dalam proses produksi dan strategi pemasaran berbasis digital. Selain itu, lembaga swasta dan komunitas lokal juga berperan dalam memberikan pelatihan tambahan, seperti manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan pengembangan jaringan bisnis.

Melalui kerja sama yang sinergis ini, DPMPTSP diharapkan dapat membantu UMKM tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga menyediakan alat dan keterampilan untuk bersaing di era digital. Pendekatan kolaboratif ini telah memberikan dampak signifikan pada pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen hingga perluasan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

## Efektivitas Pendampingan



**Grafik 1** Jumlah Permohonan SPP-PIRT Kota Surabaya

Sumber: DPMPTSP, diolah penulis

Berdasarkan grafik di atas, efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dalam pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) menunjukkan hasil yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data menunjukkan adanya lonjakan jumlah sertifikat SPP-PIRT yang diterbitkan, khususnya pada tahun 2022 yang mencapai 5.367 sertifikat, dibandingkan dengan hanya 460 pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan keberhasilan program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis yang intensif dari DPMPTSP. Namun, jumlah sertifikat pada tahun 2024 menurun drastis menjadi 2.148, yang mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan efektivitas program ini secara berkelanjutan serta perlu adanya evaluasi yang mendalam terkait penurunan pemohon.

Faktor keberhasilan pendampingan meliputi pendekatan proaktif yang diterapkan oleh DPMPTSP, seperti sosialisasi langsung di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) yang mempermudah proses administrasi. Selain itu, layanan pendampingan, seperti Klinik Investasi, memberikan kemudahan akses dan kenyamanan bagi pelaku UMKM untuk memahami dan menyelesaikan proses legalitas. Namun, penurunan jumlah sertifikat di tahun 2024 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait tantangan yang dihadapi pelaku

usaha, seperti kurangnya dukungan sumber daya, kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, atau ketidakmampuan untuk mempertahankan legalitas yang telah diperoleh.

Secara keseluruhan, pendampingan DPMPTSP telah memberikan dampak positif terhadap UMKM di Surabaya, baik dari sisi peningkatan kesadaran pelaku usaha maupun penguatan legalitas produk. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas yang lebih tinggi, diperlukan strategi adaptif, seperti pelatihan berkelanjutan, peningkatan komunikasi dengan pelaku UMKM, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk membantu pelaku usaha mengatasi hambatan yang ada. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan UMKM secara lebih komprehensif dan memastikan mereka mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam analisis SWOT menurut Freddy Rangkuiti dalam Hasanah et al. (2021), analisis SWOT adalah metode yang mengacu pada pendekatan yang logis untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengidentifikasi serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi pentingnya pendampingan dalam pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam rangka mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikasi pangan. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis SWOT untuk merancang strategi yang berfokus pada empat elemen utama—kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa dianggap sebagai faktor penting bagi keberhasilan strategi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai secara mendalam faktor-faktor tersebut sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif.

**Tabel 1** Analisis SWOT dalam Kepengurusan SPP-PIRT Kota Surabaya

<b>Kekuatan (Strengths)</b>	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>	<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
Adanya dukungan dari pemerintah daerah	Kurangnya kesadaran UMKM akan pentingnya SPP-PIRT	Meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan pangan	Perubahan regulasi yang kompleks dan sering berubah
Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di DPMPTSP	Proses perizinan yang masih dianggap rumit	Pertumbuhan ekonomi yang mendorong peningkatan jumlah UMKM	Persaingan bisnis yang semakin ketat

Adanya kerja sama dengan berbagai stakeholder	Potensi resistensi dari pelaku usaha terhadap perubahan regulasi	Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses layanan perizinan	Resistensi dari pelaku usaha yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama
Tersedianya infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung layanan perizinan	Kurangnya sosialisasi program secara intensif	Peningkatan minat investasi di Kota Surabaya	Ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi iklim usaha
Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya SPP- PIRT	Ketergantungan pelaku usaha pada dukungan pendampingan DPMPTSP	Mendorong peningkatan kapasitas produksi di kalangan pelaku usaha	Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi dan persaingan pasar yang ketat

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan data Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) di Kota Surabaya dari tahun 2021 hingga 2024, analisis SWOT dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Salah satu kekuatan yang dapat dilihat dari pendampingan ini adalah peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya SPP-PIRT, yang terlihat dari lonjakan jumlah sertifikat pada tahun 2022 mencapai 5.367. Hal ini tercermin dalam keberhasilan DPMPTSP dalam program sosialisasi dan pendampingan yang efektif. Namun, kelemahan yang ditemukan adalah ketergantungan pelaku usaha pada dukungan DPMPTSP, yang menyebabkan penurunan jumlah sertifikat menjadi 2.148 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mempertahankan sertifikasi tanpa pendampingan yang berkelanjutan.

Dari sisi lain yaitu peluang, DPMPTSP memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha dengan memanfaatkan momentum peningkatan kesadaran ini. Program pendampingan yang lebih berkelanjutan, seperti pelatihan tentang standar keamanan pangan dan praktik produksi terbaik, dapat membantu pelaku usaha tidak hanya mendapatkan sertifikasi tetapi juga meningkatkan kualitas produk

mereka secara keseluruhan. Selain itu, potensi pasar yang terus berkembang untuk produk pangan lokal memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, terdapat ancaman dari eksternal yang perlu diperhatikan, seperti perubahan kondisi ekonomi dan persaingan pasar yang ketat. Penurunan jumlah sertifikat dapat menjadi cerminan tantangan ini, sehingga diperlukan pemantauan pasar secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan dan dinamika yang berkembang.

Dengan analisis SWOT yang mendalam, DPMPTSP dapat menyusun strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pendampingan SPP-PIRT. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah sertifikat tetapi juga memastikan bahwa pelaku usaha mampu mempertahankan sertifikasi dan meningkatkan kualitas produk mereka dalam menghadapi persaingan di industri pangan yang semakin kompleks dan dapat bersaing di Kota Surabaya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya dalam proses pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana program ini ditunjang melalui sosialisasi yang intensif melalui workshop, seminar, dan kunjungan lapangan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Selain itu, pendampingan teknis berupa bantuan dalam memenuhi persyaratan perizinan, pelatihan keamanan pangan, dan pemeriksaan fasilitas produksi turut mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi yang dibutuhkan. Keberhasilan ini dapat dari lonjakan jumlah sertifikat SPPIRT yang diterbitkan pada tahun 2022 dan 2023. Namun, penurunan jumlah sertifikat pada tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dan segera diperbaiki, seperti ketergantungan pelaku usaha pada pendampingan serta kurangnya keberlanjutan program. Analisis SWOT menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah, infrastruktur teknologi informasi, dan kemitraan dengan stakeholder merupakan kekuatan yang mendukung program ini. Namun, kelemahan berupa kesadaran pelaku UMKM terhadap perubahan dan kompleksitas regulasi perlu menjadi perhatian serius.

Untuk memastikan keberlanjutan program dan memperoleh hasil yang lebih maksimal, DPMPTSP perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif. Program pelatihan berkelanjutan, peningkatan intensitas sosialisasi, dan komunikasi yang lebih efektif menjadi prioritas utama. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholder seperti Dinas Kesehatan, Badan POM, dan perguruan tinggi harus terus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang mendukung pengembangan UMKM. Pendekatan berbasis teknologi dan inovasi digital juga perlu dioptimalkan untuk mempermudah akses layanan perizinan

dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM di pasar nasional maupun internasional. Dengan langkah-langkah ini, DPMPTSP diharapkan dapat memastikan pelaku UMKM tidak hanya mendapatkan sertifikasi legalitas tetapi juga mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mereka, sehingga dapat bersaing secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candra, E. M. (2022). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UMKM Pekanbaru). *Ar-Ribhu*, 5(2), 385-391.
- Fadilah, Muhammad., Rijal., and Usep Setiawan. (2023). Pendampingan Pembuatan Perizinan Pirt dan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM Makanan Keripik Kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjavar, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(2), 25-33. doi: 10.59818/jpm.v3i2.462.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Kerupuk Fajar melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102-109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Hasanah, N. H., Sobry, M., & Anggraini, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi dalam Perspektif *Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT)*: Studi di SD NEGERI 42 AMPENAN. *El Midad: Jurnal Jurusan PGMI*, 13(1), 15-27.
- Intanghina. (2019). SPPIRT Tegal. *Convention Center di Kota Tegal*, 9.
- Lestari, Tria Tiurma., and Isra Thristy. (2021). Pentingnya Jajanan Sehat untuk Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Implementa Husada*, 2(4), 388-91. doi: 10.30596/jih.v2i4.11835.
- Mulya Putra, D., & Jumiati, J. (2022). Pelaksanaan Pendampingan Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu (Dpm-Ptsp) Provinsi Sumatera Barat. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 4(2), 164-172. <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i2.453>
- Murwadi, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha MikroKecil melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 1(1), 13-31.
- Nur, Rifani., Sindy Setiawan., Anna Apriana Hidayanti., Sri Mulyawati., and Eka Nurmindia. (2024). Pendampingan Pembuatan SPP-IRT Hasil Produk Olahan Kelompok Wanita Tani Melati di Desa Suranadi. 5(2), 1800-1805.

# **VISA: Journal of Visions and Ideas**

**Vol 5 No 2 (2025) 498-510 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643**

**DOI: 47467/visa.v5i2.6512**

- Philipus M. Hadjon, Perizinan, A. (2021). Pengantar Hukum Perizinan,. *Yuridika*, 12-46.
- Priyono, B. (2016). Perizinan sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, VIII(2), 16- 37.
- Risnanto, Habib. (2024). Efektivitas Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) secara Digital Online Single Submission (OSS) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Αγαη*, 15(1), 37-48.